

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pertanian memegang peran utama dalam ekonomi Indonesia, terutama dalam perdagangan. Ada berbagai subsektor pertanian termasuk hortikultura, tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan (Nalurita, 2014). Kopi sebagai salah satu komoditas unggulan sektor perkebunan memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, pendapatan devisa dan penghasilan bagi petani serta pelaku ekonomi terkait. Selain itu, kopi memiliki nilai ekonomis yang signifikan, baik bagi konsumen maupun bagi negara produsen seperti Indonesia yang merupakan salah satu eksportir utama biji kopi (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2012).

Agroindustri adalah subsistem agribisnis yang mengolah bahan-bahan pertanian menjadi bahan setengah jadi atau produk jadi. Agroindustri memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia dengan kopi bubuk sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas faktor produksi secara efisien (Soekartawi, 2000).

Di Sumatera Barat, tanaman kopi robusta hampir ada diseluruh daerahnya (Lampiran 2). Hal ini menunjukkan potensi baik untuk pengembangan agroindustri kopi. Dengan adanya agroindustri pengolahan kopi bubuk, dapat memberikan nilai tambah pada komoditi kopi dan menyediakan sumber pendapatan bagi pelaku ekonomi yang terlibat dalam pengolahan dan pemasaran kopi bubuk.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berperan penting dalam peningkatan perekonomian Indonesia dan dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan nasional. Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan motor penting dari pertumbuhan ekonomi, inovasi dan progres teknologi (Thomburg dalam Tambunan, 2009). Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah merupakan salah satu strategi pembangunan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam upaya pengembangan usaha kecil dan menengah ini diperlukan informasi yang lengkap, mudah dan cepat. Selain itu pada informasi potensi suatu sektor usaha ekonomi atau komoditas untuk dikembangkan pada suatu wilayah tertentu, dan faktor-

faktor yang mempengaruhi pengembangannya, serta prospek pengembangan program kemitraan terpadu untuk sektor usaha atau komoditas tersebut.

Tambunan (2009) menyebutkan pada usaha menengah sebagian besar pemilik usaha telah berpendidikan baik, memiliki akses program pemerintah dan sudah memperkejakan manajer profesional. Hal tersebut menandakan bahwa usaha menengah memiliki modal insani yang baik. Selain itu, telah terbentuknya manajemen dan struktur organisasi formal pada usaha menengah mempresentasikan modal sosial yang baik. Oleh karena itu, tenaga kerja atau sumber daya manusia disebut sebagai *intangibile asset*. *Intangible asset* ini dapat dipresentasikan melalui modal insani dan modal sosial.

Modal insani adalah kombinasi antara pengetahuan, inovasi, dan kemampuan yang dimiliki seseorang ketika melakukan tugasnya untuk mencapai tujuannya (Ongkoraharjo, 2009). Menurut Gaol (2014) menyatakan bahwa *human capital* merupakan adalah pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*expertise*), kemampuan (*ability*) dan keterampilan (*skill*) yang menjadikan manusia atau karyawan sebagai modal atau aset suatu perusahaan.

Modal insani kewirausahaan berkaitan dengan kebiasaan dalam aktivitas kewirausahaan, pembelajaran melalui pengalaman dan kemampuan membangun hubungan sosial yang memudahkan jalannya bisnis (Toth, 2012). Nilai modal insani dapat juga ditingkatkan melalui kemauan dan niat yang dibangun terhadap hubungan-hubungan sosial untuk memudahkan jalannya bisnis.

Modal sosial dapat dijelaskan sebagai produk relasi manusia satu sama lain, khususnya relasi yang intim dan konsisten. Modal sosial merujuk pada jaringan, norma, dan kepercayaan yang berpotensi pada produktivitas masyarakat. Modal sosial bersifat kumulatif dan bertambah dengan sendirinya (Suharto, 2010) dalam Anam (2013). Modal sosial merupakan penampilan organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma-norma (atau hal timbal balik), dan jaringan (dari ikatan-ikatan masyarakat). Penampilan organisasi sosial tersebut dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi adanya koordinasi dan kerjasama bagi keuntungan (Field, 2010).

Modal sosial dalam ekonomi suatu usaha adalah rasa percaya dan kemampuan seseorang dalam membangun jaringan suatu usaha serta kepatuhan

terhadap norma atau tata nilai yang berlaku dalam kelompok maupun masyarakat disekitarnya dimana modal sosial dapat memberikan keuntungan untuk mengakses modal lainnya serta memfasilitasi kerjasama antar kelompok masyarakat. Rasa percaya adalah keyakinan bahwa orang lain tidak akan berniat buruk pada diri kita. Jaringan kerja suatu usaha adalah ikatan formal dan informal yang dimiliki seseorang dari jumlah keanggotanya dalam organisasi. Norma merupakan nilai-nilai yang bertujuan untuk membangun kegiatan bersama dan menguntungkan bagi semua pihak di dalam suatu usaha ekonomi (Utari, 2011).

Peranan modal sosial dalam meningkatkan kinerja organisasi sangatlah penting. Schuller dan Theisens (2010), mendefinisikan modal sosial sebagai konsep secara spesifik dalam hal jaringan, menekankan sifat hubungan yang penuh akan norma di dalam dan di antara mereka. Modal sosial suatu perusahaan juga mengacu pada hubungan dengan pelanggan dan stakeholder terkait pada konteks perusahaan yang berorientasi pada laba. Kesuksesan unit usaha bergantung pada jaringan sosial dalam berbisnis. Pengusaha menggunakan suatu alat yang digunakan sebagai gambaran dalam mengurangi resiko dan biaya transaksi, dan juga untuk memperbaiki akses kepada ide bisnis, pengetahuan dan modal. Modal sosial dalam bentuk ikatan jaringan, kepercayaan dan visi bersama di antara anggota jaringan telah ditemukan mempengaruhi kinerja perusahaan kecil dengan menghasilkan sumber daya, memberikan informasi dan pengetahuan dan mengembangkan kemampuan baru.

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UMKM. Menurut UU RI No. 20 Tahun 2008 menyatakan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dengan cara memberikan insentif bagi usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan teknologi dan kelestarian lingkungan hidup. Selain itu juga pemerintah melakukan upaya pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran, mengatasi kemiskinan dan mencapai pemerataan pendapatan.

Pembangunan dan pertumbuhan UMKM dianggap sebagai motor utama dalam memajukan ekonomi suatu negara. Perkembangan UMKM yang baik akan membawa kemajuan bagi perekonomian suatu negara. Untuk memberdayakan UMKM diperlukan peran pemerintah, lembaga-lembaga keuangan dan pelaku usaha. Peran pemerintah terletak pada penetapan kebijakan yang menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, sementara lembaga keuangan berperan sebagai perantara yang mengoptimalkan pemberdayaan UMKM. Pelaku usaha sendiri juga memiliki peran penting dalam perkembangan UMKM karena pelaku usaha memiliki potensi yang kuat dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM ini.

Kinerja merupakan suatu ukuran untuk menilai suatu lembaga. Kinerja yang baik adalah hasil kesungguhan kerja karyawan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Soemohadiwidjojo (2018) mendefinisikan manajemen kinerja sebagai sistem yang diterapkan untuk memastikan tujuan bisnis dapat tercapai secara efektif dan efisien, serta menyelaraskan tujuan bisnis dengan hasil kinerja karyawan. Menurut Romansyah (2015) kinerja usaha adalah hasil kerja yang dicapai perusahaan baik itu dalam hal kualitas maupun kuantitas dalam waktu tertentu. Sedangkan menurut Moeharjono (2009) mengatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan, kebijakan dalam melaksanakan sasaran, tujuan, visi dan misi dalam sebuah kegiatan. Kinerja pada dasarnya mencakup sikap mental dan perilaku yang selalu mempunyai pandangan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan saat ini harus lebih berkualitas daripada pelaksanaan pekerjaan masa lalu, untuk saat yang akan datang lebih berkualitas daripada saat ini.

Tampubolon (2014) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kinerja seseorang individu atau kelompok didalam suatu industri untuk mencapai tujuannya sesuai dengan tanggung jawabnya dan wewenang, sesuai moral dan tidak melanggar hukum. Menurut Dokko (2004), dua hal yang dapat mengukur kinerja organisasi yaitu produktivitas dan daya inovasi. Produktivitas adalah aspek dari kinerja tentang seberapa banyak dan cepat suatu pekerjaan dapat diselesaikan. Sedangkan daya inovasi adalah aspek dari pekerja untuk melihat ke depan dan melakukan sebuah perubahan untuk memperbaiki kinerjanya. Menurut Busro (2018), produktivitas kerja merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok

orang untuk menghasilkan barang dan jasa dalam waktu tertentu yang telah ditentukan atau sesuai dengan rencana. Kemampuan disini menurut peneliti bisa diartikan sebagai kemampuan fisik atau bisa juga disebut kemampuan keterampilan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia keterampilan diartikan sebagai kecakapan untuk menyelesaikan tugas.

Berbagai penelitian yang ada membuktikan antara lain, pada penelitian Wahyuningrum (2013) membuktikan bahwa modal insani dan modal sosial memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja pada UMKM kerajinan di Depok. Hasil penelitian pada Fanani dan Fitriyati (2021) yang berjudul pengaruh modal insani dan modal sosial terhadap kinerja UMKM makanan dan minuman di Surabaya bahwa modal insani dan modal sosial berpengaruh positif akan kinerja UMKM. Selanjutnya Hasil penelitian Prasetyo (2013) terhadap UMK di Jawa Timur menyatakan bahwa UMK akan lebih berkembang apabila mendapat dukungan maksimal dalam modal sosial seperti kepercayaan dan jaringan dari berbagai pihak sehingga memudahkan memperoleh dukungan finansial dan non finansial. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian peneliti adanya peran pemerintah yang berhubungan dengan modal insani dan modal sosial terhadap kinerja UMKM. Pengaruh *human capital* yang diteliti oleh Ramadhan & Resmi (2020) terhadap kinerja keuangan UMKM memaparkan hasil bahwa modal struktural dan modal manusia berpengaruh positif serta signifikan kepada kinerja keuangan UMKM. Berdasarkan uraian konsep dan landasan diatas maka peneliti melakukan penelitian yang menggabungkan modal insani, modal sosial dan peran pemerintah yang mempengaruhi kinerja pada UMKM kopi bubuk di Kabupaten Tanah Datar.

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu produsen kopi terbesar di Sumatera Barat dan salah satu komoditas yang menjadi unggulan Kabupaten Tanah Datar yaitu kopi (Setiawati, 2016). Luas panen kopi yang dimiliki Kabupaten Tanah Datar seluas 1.431 Ha dan produksi sebesar 1.271,48 Ton (Lampiran 3).

Sektor UMKM di Kabupaten Tanah Datar merupakan sektor terbesar dalam roda perekonomian tindakan pemerintah dalam mengatasi angka pengangguran di Provinsi Sumatera Barat. Dari data yang didapat di Dinas Koperasi Usaha Kecil

dan Menengah, Perindustrian serta Perdagangan (KOPERINDAG) Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2021 ada sebanyak 28.812 UMKM dari berbagai sektor usaha, dan dengan banyaknya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ada tentunya pemerintah Kabupaten Tanah Datar sangat memanfaatkan dan bergantung kepada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk membantu perekonomian daerah dengan membuka lapangan pekerjaan baru dan bekerja sama dengan pihak ketiga.

Kabupaten Tanah Datar merupakan kabupaten yang memiliki UMKM pengolah kopi terbanyak di Sumatera Barat dengan jumlah 213 UMKM dengan persentase sebesar 48 % dari total UMKM pengolah kopi di Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan adanya peluang pengembangan agribisnis kopi di Kabupaten Tanah Datar yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, 2019). Berikut gambaran data penjualan dan produksi dari pelaku usaha UMKM kopi bubuk yang berada di Kabupaten Tanah Datar (Lampiran 4).

B. Rumusan masalah

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terlibat dalam produksi kopi bubuk di Kabupaten Tanah Datar telah ada selama beberapa generasi, tetapi hingga saat ini, metode pengolahan kopi bubuk masih bersifat tradisional. Mayoritas produk kopi bubuk masih dikemas secara sederhana menggunakan plastik biasa dengan cap sablon, walaupun beberapa pengolah kopi bubuk Kabupaten Tanah Datar sudah beralih menggunakan kemasan yang lebih modern dengan menggunakan *aluminium foil* dan penutup *zipper*. Kabupaten Tanah Datar memiliki sekitar 213 UMKM yang terlibat dalam pengolah kopi dan perkiraan adalah bahwa jumlah UMKM ini akan terus bertambah namun pada kenyataannya belum diiringi oleh peningkatan kualitas produk yang dihasilkan UMKM tersebut.

Permasalahan yang dihadapi pada UMKM pengolah kopi Kabupaten Tanah Datar yakni berkaitan dengan rendahnya produktivitas dari kineja UMKM tersebut. Keadaan ini disebabkan oleh adanya faktor internal dan eksternal yang dihadapi oleh UMKM pengolah kopi bubuk di Kabupaten Tanah Datar. Masalah internal yang sering kali dihadapi antara lain, rendahnya kualitas sumber daya

manusia UMKM dalam manajemen dikarenakan kompetensi tenaga kerja yang relatif rendah disebabkan tingkat pendidikan yang rendah dan kurang pengetahuan manajemen sehingga berdampak pada belum optimalnya kinerja manajemen pengelolaannya serta kurangnya akses permodalan. Selain itu juga penguatan teknologi dan pemasaran, serta terbatasnya akses UMKM dalam hal informasi dan pasar serta faktor produksi lainnya (Suryani, 2021).

Sedangkan masalah eksternal yang dihadapi kinerja UMKM pengolah kopi bubuk Kabupaten Tanah Datar diantaranya aspek kebijakan pemerintah dan peranannya. Peran pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanah Datar masih belum maksimal dalam menyentuh solusi yang berkenaan dengan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja pelaku UMKM pengolah kopi selama ini masih belum memadai. Beberapa program pengembangan UMKM sudah dijalankan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tanah Datar antara lain program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM, serta program penciptaan iklim usaha yang kondusif (Lampiran 5). Dari program tersebut masih belum efektif dijalankan, hal ini dikarenakan para pelaku UMKM pengolah sebagian besar memiliki keterbatasan segi pendidikan formal maupun dari segi pengetahuan, keterampilan dan teknologi. Keadaan ini menyebabkan susah untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam kemampuan manajerial secara maksimal dalam meningkatkan kinerja usaha UMKM kopi tersebut.

Permasalahan yang dihadapi UMKM pengolah kopi bubuk Kabupaten Tanah Datar tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Suryani (2021) kinerja UMKM Kabupaten Tanah Datar masih tertinggal termasuk UMKM kopi bubuk. Hal ini disebabkan kekurangmampuan UMKM dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi dan pemasaran serta rendahnya kompetensi kewirausahaan. Selain itu juga kurangnya kapabilitas tenaga kerja yang dapat dilihat dari tingkat keterlibatan tenaga kerja dalam proses pengambilan keputusan yang terbatas, kapabilitas sistem informasi yang belum memadai karena usaha pengolahan kopi

masih dilakukan secara sederhana, motivasi dan pemberdayaan tenaga kerja yang masih rendah, prosedur dan instruksi kerja yang belum memadai serta proses inovasi produk yang belum dilakukan secara maksimal karena hanya mengandalkan kebiasaan yang sudah dilakukan tanpa melakukan inovasi lebih lanjut. Aqila (2022) menyatakan bahwa kinerja usaha agroindustri kopi bubuk memiliki pertumbuhan volume penjualan yang tidak konstan jumlahnya dari tahun ke tahun sehingga kinerja usahanya tidak cukup baik. Selain itu Fihzi (2022) mengemukakan bahwa kinerja usaha kopi bubuk mengalami kesulitan dalam memperluas wilayah penjualannya karena disebabkan banyaknya pesaing yang sama sehingga kinerja usahanya tidak berjalan dengan baik.

Menurut Hanifah (2011) ada indikasi bahwa rendahnya kinerja dan produktivitas UMKM mungkin disebabkan oleh kurangnya karakter wirausaha yang kuat dan peran manajerial yang belum optimal didalam mengelola usaha pada lingkungan bisnis yang mengalami perubahan yang cepat. Masalah lain yang dihadapi oleh para pelaku UMKM adalah kurangnya jaringan bisnis yang dimiliki sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pemasaran dari produk yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan rata-rata para pengolah kopi bubuk masih melakukan daerah pemasaran yang masih lama dan belum mengembangkan daerah pemasaran lebih luas.

Selain itu, upaya untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya modal insani dan modal sosial kepada para pelaku UMKM yang terlibat dalam pengolahan kopi di Kabupaten Tanah Datar masih belum dilakukan secara memadai Hal ini dikarenakan UMKM pengolah kopi merupakan usaha turun temurun dan mayoritas pekerja banyak yang sudah usia lanjut sehingga menjadi kendala tersendiri bagi UMKM karena akan sulit untuk menciptakan kreativitas dan inovasi. Kesulitan-kesulitan ini menyebabkan produktivitas kerja UMKM pengolah kopi masih rendah dan kemampuan daya inovasi memerlukan pihak-pihak yang berkomitmen untuk mewujudkannya. Berbagai faktor dapat mempengaruhi kinerja suatu bisnis. Menurut Rapih (2015), faktor penentu pada keberhasilan unit bisnis biasanya terkait dengan kualitas sumber daya manusia serta modal yang tersedia. Gabungan antara kualitas sumber daya manusia dengan modal yang ada berperan penting dalam menjaga kelancara operasional UMKM

serta kemampuannya untuk bersaing di pasar. Oleh karena itu, modal menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam menjalankan roda usaha.

Menurut Suryana (2013) dalam kewirausahaan, modal tidak yang hanya berwujud seperti uang dan barang saja, tetapi modal juga dapat berupa sumber daya yang tidak terwujud. Secara umum, modal yang tidak berwujud dapat dibedakan seperti modal insani, modal sosial, modal moral dan mental dan modal motivasi. Penelitian ini hanya akan berfokus pada modal insani dan modal sosial. Felicio *et al* (2014) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi dalam hal ini kinerja UMKM yaitu modal insani dan modal sosial. Kedua modal tersebut merupakan modal yang sangat berpengaruh dalam dunia bisnis. Semakin luas modal insani dan modal sosial yang dimiliki maka akan meningkatkan kinerja usaha.

Upaya peningkatkan perkembangan kinerja UMKM tidak terlepas dari perilaku pelaku usaha yang tercermin dalam modal insani dan modal sosial. Untuk menghadapi masalah-masalah tersebut modal insani dan modal sosial perlu dikembangkan agar menghasilkan kinerja UMKM yang lebih baik dan berkembang. Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, sehingga dapat dirumuskan permasalahannya yaitu :

1. Bagaimana kondisi modal insani, modal sosial, peran pemerintah dan kinerja UMKM kopi bubuk di Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana pengaruh modal insani, modal sosial sosial dan peran pemerintah terhadap kinerja UMKM kopi bubuk di Kabupaten Tanah Datar?

Dari beberapa pertanyaan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Modal Insani, Modal Sosial dan Peran Pemerintah Terhadap Kinerja Usaha UMKM Kopi Bubuk di Kabupaten Tanah Datar”**.

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan yang dikaji, tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menggambarkan modal insani, modal sosial, peran pemerintah dan kinerja UMKM kopi bubuk di Kabupaten Tanah Datar.

2. Menganalisis pengaruh modal insani, modal sosial dan peran pemerintah terhadap kinerja UMKM kopi bubuk di Kabupaten Tanah Datar.

D. Manfaat penelitian

1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat memberikan bukti empiris mengenai hubungan modal insani, modal sosial dan peran pemerintah terhadap kinerja umkm kopi di Kabupaten Tanah Datar.

2. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian dapat sebagai menambah pengetahuan dan referensi literature untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pemilik UMKM

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai data dan informasi tambahan untuk pembuatan strategi dalam pengelolaan sumber daya manusia.

4. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pengambilan keputusan dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan guna pengambilan keputusan dan pertimbangan dalam pemberdayaan UMKM.

